

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalalia Indonesia, Bogor.
- Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta.
- Fauzan H.M., Siagian, Baharuddin, 2017, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamidi, Jazim, Sugiharto, Moch. Adi, Ihsan, Muhammad, 2013, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Harahap, Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2017, *Angkatan Kerja Indonesia Peluang dan Tantangan*, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2018, *Statistik Antar Kerja*, Direktorat Jendral Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Pengembangan Pasar Kerja, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2000, *Pembinaan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Manulang, Sendjun H., 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Nonet, Phillipe dan Selznick, Philip, 2007, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Syamsuddin, Mohd. Syaufii, 2004, *Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta.

Tanya, Bernard L, dkk, 2013 *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, 150 Pertanyaan tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas*, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.

Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik Teori & Prsoses*, Buku Kita, Jakarta.

-----, 2012, *Kebijakan Publik*. CAPS, Jakarta,

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, PT Buku Seru, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.

C. Jurnal

Gitmawati Rahmadewi, “Pedoman MoU Kerjasama Luar Negeri Tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri”, *Informasi Hukum, Media Komunitas Praktisi Hukum Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian*, Volume XIV No.1, Maret 2012.

Philipus M Hadjon, “Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatif (normatif)”, *Yuridika*, No 6 Tahun IX, 1994.

D. Majalah

Kementerian Ketenagakerjaan, “LTSA Wujudkan Perbaikan Tata Kelola Pekerja Migran” *Tempo*, 10-16 Desember 2018.

Sujana Royat, TKI dan Pemberdayaan Masyarakat, *Komite*, Tim Pelaksana Publikasi Komite Penanggulangan Kemiskinan (TP2KPK), 2009.

E. Hasil Penelitian

Agus Baha'udin, 2016, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Pasacasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pocut Eliza, 2016, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran, *Hasil Penelitian*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Siprianus Edi Hardum, 2018, “Penguatan Perlindungan Hukum TKI di Luar Negeri Sebagai Penghasil Devisa”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

F. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Ai Rodiah, Divisi Rekrutmen pada PT Zisra Dwi Jaya, Jakarta, 22 Mei 2019.

Wawancara dengan Ibu Laras, Divisi Admin Koordinator pada PT Zisra Dwi Jaya, Jakarta, 22 Mei 2019.

Wawancara dengan Ibu Lia Parisiana, Kasubdit Kelembagaan Penempatan Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 29 Mei 2019.

G. Internet

AA.com, “Indonesia dan Arab Saudi teken perjanjian penempatan tenaga kerja”, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/indonesia-dan-arab-saudi-teken-perjanjian-penempatan-tenaga-kerja/1279566>.

Academia.edu, “Tujuan Ilmu Hukum”, https://www.academia.edu/32445194/Tujuan_Ilmu_Hukum.

Antaraneews, “Indonesia-Arab Saudi Uji Sistem Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran”, <https://www.antaraneews.com/berita/757561/indonesia-arab-saudi-uji-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran>.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “SISKO TKLN BNP2TKI”, siskotkln.bnp2tki.go.id.

Ady Thea DA, Hukumonline, “Pemerintah Ingatkan Penghapusan Diskriminasi Ketenagakerjaan”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c82bc2b00e0d/pemerintah-ingatkan-penghapusan-diskriminasi-ketenagakerjaan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “Kebijakan”, <https://kbbi.web.id/bijak>.

Kompas, “Indonesia dan Arab Saudi Bikin Sistem Satu Kanal Pekerja Migran,”

<https://biz.kompas.com/read/2018/10/12/154327228/indonesia-dan-arab-saudi-bikin-sistem-satu-kanal-penempatan-pekerja-migran;>

PT Zisra Dwi Jaya, “Who We Are”, <https://www.zisra.co.id/about-us/>.

Suara.com, “Kemnaker Sosialisasi UU PMI Pada Perusahaan Penempatan Pekerja”, *Suara.com*,

<https://www.suara.com/bisnis/2017/12/15/1400/kemnaker-sosialisasi-uu-ppmi-pada-perusahaan-penempatan-pekerja>.

Universitas Jember, Digital Respository, “Kegiatan Usaha”,

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/6306>.